

## ABSTRAK

Penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa (UE) sebagai bagian dari Stabilisation and Association Agreement menjadi kebijakan UE yang janggal dilakukan. Hal tersebut dikarenakan Kosovo merupakan negara dengan pengakuan terbatas yang kemerdekaannya tidak diakui oleh lima negara anggota UE, yaitu Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol. Selain itu, Kosovo juga tidak memenuhi Kriteria Kopenhagen yang menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi anggota UE. Dengan demikian, terdapat anomali dari kebijakan UE, dan keunikan tersebut memunculkan pertanyaan terkait dengan legitimasi UE dalam menetapkan negara kandidat keanggotaan UE. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat alasan di balik UE tetap menjadikan Kosovo sebagai kandidat potensial, yaitu dengan melihat aspek pragmatis dan normatif UE. Melalui aspek pragmatis, UE melakukan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Eropa yang ditunjukkan dengan tidak mengindahkan persyaratan keanggotaan UE terhadap Kosovo. Dalam aspek normatif, UE sebagai aktor hegemon normatif berusaha untuk menyebarkan nilai dan norma UE di luar batas teritorinya. Pada akhirnya, isu stabilitas dan keamanan, serta penyebaran nilai-nilai normatif UE tidak dapat dipisahkan dari kebijakan UE dalam menetapkan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE.

**Kata-Kata Kunci:** Kandidat Potensial Uni Eropa, Kosovo, Uni Eropa, Stabilitas, Keamanan, Normatif

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa (UE) telah menetapkan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan UE (European Commission t.t). Keputusan tersebut tetap dilakukan oleh UE walaupun 79 negara di dunia (The World Bank 2017) termasuk lima dari anggota UE, Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol tidak mengakui kemerdekaan Kosovo (Miltrovic 2015). Penetapan kandidat potensial keanggotaan UE menjadi bagian dari kesepakatan UE dengan Kosovo melalui Stabilisation and Association Agreement (SAA)<sup>1</sup> pada 27 Oktober 2015 di Strasbourg (European Council 2015) yang mulai diberlakukan pada 1 April 2016 (European Commission t.t). Melalui kesepakatan tersebut, untuk pertama kalinya hubungan kontraktual dilaksanakan antara UE dengan Kosovo, serta sebagai dasar untuk mengimplementasikan proses aksesi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Stabilisation and Association Agreement (SAA) merupakan kerangka kerja antara UE dengan negara-negara Balkan Barat, yakni Bosnia dan Herzegovina, Albania, Republik Makedonia, Montenegro, Kosovo, serta Serbia, untuk mengimplementasikan Stabilisation and Association Process (SAP). UE meluncurkan SAP pada Juni 1999 dan diperkuat di KTT Thessaloniki pada Juni 2003 yang menekankan tercapainya tiga tujuan. Pertama, menciptakan negara yang secara politis mampu menumbuhkan transisi dalam pasar ekonomi global. Kedua, mempromosikan kerjasama kawasan. Ketiga, keanggotaan UE. Singkatnya, kesepakatan ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi domestik negara Balkan Barat untuk membangun area perdagangan bebas dan tujuan politik demi menciptakan kerja sama kawasan Eropa (European Commission t.t). Untuk pembahasan lebih lanjut, dapat dilihat di: [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/saa_en).

<sup>2</sup> Aksesi merujuk pada saat suatu negara secara resmi bergabung dengan sekelompok negara atau menandatangani suatu perjanjian (Cambridge Dictionary t.t). Dalam UE, aksesi tidak bersifat otomatis, bergantung pada persiapan dari negara pemohon dan kapasitas UE dalam mengintegrasikan anggota baru. Aksesi ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara anggota UE dan negara kandidat (European Commission t.t). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di [https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu\\_en](https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-eu_en).